

**Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19  
melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial  
*Studi: Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)***

***Handling Social and Economic Impact of Pandemic Covid 19 Through  
Social Entrepreneurship Approach  
Study: Empowerment of Small and Medium enterprise (SME)***

**Aryan Torrido**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jalan Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Email:aryanridho@gmail.com. Hp:081904049274.

Naskah diterima 8-12-2020 direvisi 14-12-2020 disetujui 14-3-2021

***Abstract***

*The Covid 19 pandemic that occurred in 2020 created a different economic crisis, the impact of the problems that were raised was more complex because it occurred in all countries at one time resolving the causes and impacts. This article seeks to provide an overview of the social and economic impacts of the Covid 19 pandemic and provide alternative coping strategies with a social entrepreneurship approach. The research method used is a literature review, conducting studies on writings related to the purpose of writing articles. As a result, the Covid 19 pandemic had a negative impact on worsening the economic condition of the State of Indonesia and increasing new poverty, but on the other hand there is a positive impact, namely the increase in the social piety of the Indonesian people and there are several businesses that made huge profits during the Covid 19 pandemic. So it is necessary to consider a coping strategy model that is can collaborate market, state, and aultrism which is offered in this article a coping model based on social entrepreneurship. This model recommends that large state-owned, private companies and all Indonesian Ministries play a role as social enterprises in maintaining the sustainability of their social programs.*

***Keywords: impact; pandemic covid-19; social entrepreneurship***

**Abstrak**

Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020 menciptakan krisis ekonomi berbeda pada semua negara, dan berdampak pada semua kategori usaha. Artikel ini berusaha memberikan gambaran mengenai dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19 dan memberikan alternatif strategi penanggulangan dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review*, dengan melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan mengenai dampak pandemi dan kewirausahaan sosial, terdapat delapan artikel yang dianalisis. Hasilnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif memperburuk kondisi ekonomi Negara Indonesia dan meningkatkan kemiskinan baru, namun di sisi lain terdapat dampak positif yakni meningkatnya kesalehan sosial masyarakat Indonesia serta terdapat beberapa bisnis yang meraup keuntungan besar selama pandemi Covid-19. Perlu mempertimbangkan model strategi penanggulangan yang dapat mengkolaborasi pasar, negara, dan aultrisme atau kesalehan sosial yang ditawarkan dalam artikel ini sebuah model penanggulangan berbasis kewirausahaan sosial. Model ini merekomendasikan perusahaan besar milik negara, swasta, dan semua Kementerian Indonesia berperan sebagai *social enterprise* dalam menjaga keberlanjutan program sosialnya.

**Kata kunci: dampak; pandemi covid-19; kewirausahaan sosial**

## Pendahuluan

Dalam beberapa bulan terakhir ini tema pandemi virus Corona merupakan sesuatu yang hangat bahkan sexy untuk dibicarakan. Dari kerumunan (*crowd*) di angkringan sampai media ilmiah gencar membicarakan Corona. Alur pembicaraannya banyak yang melakukan analisa menggunakan prespektif yang bukan merupakan bidangnya berdasarkan sedikit info yang didapat. Apabila analisisnya benar tidak akan menimbulkan kesalahpahaman pengertian, tetapi akan berbeda kalau salah, bisa menyesatkan. Contoh kejadian yang penulis alami sendiri, sekitar dua bulan yang lalu di salah satu anjungan tunai mandiri (ATM) wilayah Yogyakarta, terdapat tukang parkir yang rajin mengingatkan kepada setiap pengunjung bahwasanya virus Corona itu adanya di Jakarta, sementara untuk daerah Yogyakarta terbilang masih aman, padahal Provinsi DIY sampai dengan akhir Oktober Tahun 2020 masih mengalami peningkatan pada jumlah orang dengan status positif Corona. Bentuk tindakan tukang parkir tersebut bisa dimaknai sebagai representasi perasaan takut seandainya banyak orang tidak mau keluar rumah. Dampaknya akan tidak ada lagi kendaraan yang parkir dan jika hal itu terjadi, dapat mempengaruhi pendapatan.

Berkurangnya mobilitas gerak manusia pada situasi pandemi Corona dipengaruhi perasaan takut tertular, perasaan ini yang sekarang banyak dirasakan semua manusia di dunia. Virus Covid-19 yang pertama kali muncul di Kota Wuhan Negara Cina pada Bulan Desember Tahun 2019, bergerak sangat cepat ke berbagai negara, sehingga merupakan suatu pandemi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) makna pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, lebih bermakna pada penyebaran virus yang menyebar secara cepat dan melanda seluruh negara-negara yang ada di dunia (Sitorus & Hidayat, 2020). Perasaan takut ini yang mendorong banyak orang baik melalui kesadaran sendiri atau dipaksa dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan *stay at home* dan *physical distancing* (jaga jarak) agar

tidak tertular selain memakai masker dan cuci tangan. Fenomena ini membawa kehidupan manusia kedalam normalitas baru (*the new normal*) yang meliputi cara bekerja, cara belajar hingga cara bersosialisasi. Normalitas baru ini menciptakan *snowball effect* dan efek yang paling nyata adalah ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan setiap individu mengalami penurunan produktivitas dalam kegiatan ekonominya, baik dalam lingkup produksi maupun konsumsi.

Adanya penurunan produktivitas tentunya mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial walaupun sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia semenjak Tahun 2015 sudah mengalami penurunan, namun semakin terpuruk pada situasi pandemi Corona. Sebagaimana yang disampaikan Rizal Ramli dalam salah satu forum ilmiahnya;

“Kondisi ekonomi Negara Indonesia sejatinya sudah sangat jelek sebelum terjadinya pandemi COVID-19”. Menurutnya memang pandemi tersebut berkontribusi memperparah krisis ekonomi yang terjadi, ibarat orang yang sudah jalan sempoyongan kemudian ditinjau”.

Banyak ilmuwan sosial dan ekonomi nasional ataupun dunia memiliki pendapat sama mengenai krisis ekonomi akibat pandemi berbeda dengan krisis Tahun 1998 dan Tahun 2007, dampak pandemi meliputi semua pelaku-pelaku usaha sementara dua krisis sebelumnya tidak berdampak pada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), bahkan UKM masih bisa menjadi katup penyelamat perekonomian Indonesia, pendapat ini juga tegas disampaikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan Negara Indonesia.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? berangkat dari pertanyaan inilah tujuan artikel disusun agar dapat memberikan tambahan informasi atau kajian mengenai strategi penanganan dampak pandemi, fokus kajian lebih menitikberatkan pendekatan “kewirausahaan sosial sebagai solusi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19”. Konstruksi pemikiran solusi berbasis pendekatan konsep kewirausahaan sosial, diharapkan dapat emberikan manfaat pada pemahaman mengenai konsep kewirausahaan sosial sebagai sebuah strategi penanganan

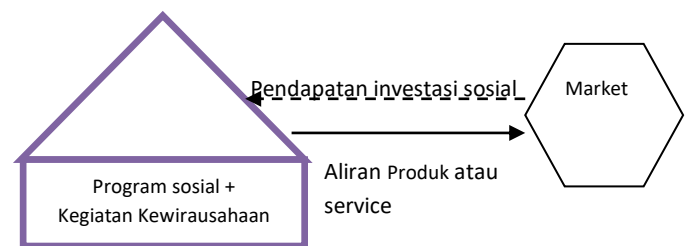
masalah sosial berbasis pemberdayaan ekonomi, sekaligus pemikiran solusi didalamnya bisa digunakan sebagai referensi para pelaku usaha dan pemerintah dalam pertimbangan kebijakan penanggulangan dampak ekonomi Covid-19.

Sebelum sampai pembahasan, terlebih dahulu memahami konsep *new normal* dan kewirausahaan sosial agar memperoleh gambaran pendahuluan. Istilah *new normal* sudah ada dari dulu, digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan di dunia akibat adanya krisis ekonomi. Menurut Roger McNamee (LaBarre, 2003), *new normal* selalu akan terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Sehingga manusia harus secara sabar belajar dan terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi. Bahkan, McNamee menambahkan, pengertian “normal” dari *new normal* berkaitan dengan skala waktu, berkaitan upaya manusia dalam mengembangkan perilaku yang sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dalam jangka panjang.

Sementara konsep kewirausahaan sosial sebagai pendekatan yang dipakai dalam konstruksi solusi diambil dari pemikiran Nicholls and Cho (Nicholls & Cho, 2006), “merupakan sebuah konsep dalam kegiatan kewirausahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan profit serta menyelesaikan masalah sosial dan atau lingkungan”. Berangkat dari definisi tersebut, menurut penulis konsep kewirausahaan sosial dapat dikondisikan kedalam dua hal: (1) jika dikaitkan dengan prespektif pelaku usaha, maka mengarahkan penggunaan logika “kapitalis baik”, berpikir mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) dan investasi sosial sekaligus. Sedangkan yang ke (2) berkaitan dengan pemerintah, berpikir untuk menciptakan sinergitas antara usaha besar milik pemerintah atau swasta dengan usaha kecil dan pengkondisian kegiatan ekonomi milik setiap kementerian untuk investasi sosial berbasis pemberdayaan ekonomi komunitas.

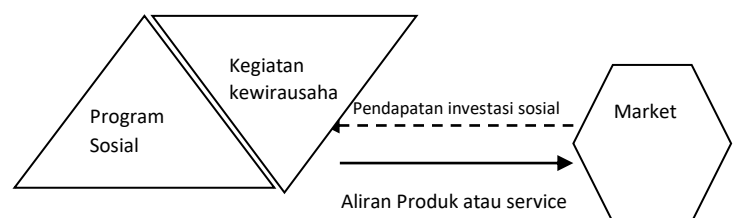
Implementasi pola pelaksanaannya dikembangkan oleh Alter, S.K. (Alter, 2006) kedalam rumusan tiga model kewirausahaan

sosial, keterkaitannya pada keberlanjutan usaha pemberdaya mempengaruhi keberlangsungan investasi sosial pada komunitas sasarannya; (1) Model integrated, merupakan pola kewirausahaan sosial dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku (pemberdaya) dan komunitas sasaran sama, bisa diterjemahkan dengan komunitas sasaran bekerja dalam kegiatan usaha yang dimiliki pihak atau kelompok pemberdaya, secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model Integratif (Modifikasi)  
Sumber: Alter. S,K (2007)

Model no (2) adalah bersinggungan, yakni kegiatan ekonomi pemberdaya dengan komunitas sasaran saling melengkapi atau berhubungan, sebagai contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan bank sampah milik Aziz di Kabupaten Bantul, komunitas sasaran sebagai *supplier* sampah yang akan dibeli dan diolah oleh bank sampah menjadi kerajinan daur ulang, lihat Gambar 2.

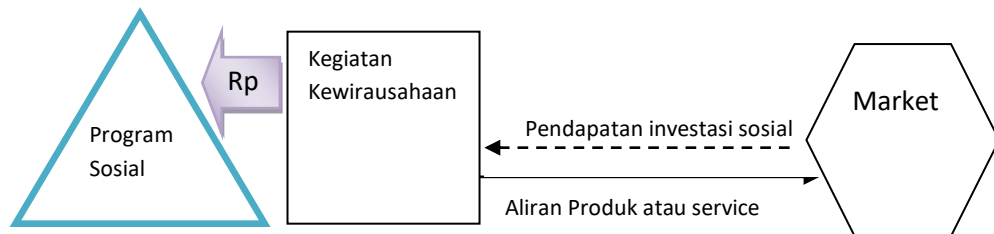


Gambar 2. Model Bersinggungan (Modifikasi)  
Sumber: Alter. S,K (2006)

Terakhir adalah (3) Model terpisah, antara kegiatan ekonomi pemberdaya dan komunitas sasaran terpisah, atau tidak saling melengkapi bahkan tidak terdapat hubungan sama sekali. Model ini banyak diterapkan

dalam program CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Darmawi, 2019), seperti yang dilakukan salah satu BUMN, yaitu TWC (Taman Wisata Candi) di Yogyakarta yang melakukan pemberdayaan ekonomi olahan makanan singkong pada komunitas sasaran para Ibu rumah tangga di Dusun Cepit

Desa Bokoharjo Prambanan. Pilihan terhadap olahan singkong dikarenakan banyaknya tanaman bahan baku di sekitar wilayah sasaran. Lebih lanjut bentuk sederhana alur pada model terpisah bisa dilihat di Gambar tiga yang ada di bawah ini.



Gambar 3. Model Terpisah (Modifikasi)

Sumber: Alter, S,K (2007)

## Penggunaan Metode Penelitian

Dalam mengungkap tujuan penelitian dan penyesuaian terhadap situasi pandemi corona yang mengurangi studi lapangan maka pendekatan dilakukan dengan kajian literatur (*literature review*), merupakan suatu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan data primer dan fokus pada kajian data sekunder. Artikel ini fokus pada data sekunder meliputi tulisan-tulisan yang diterbitkan antara Tahun 2015-2020 yang berhubungan dengan tujuan penulisan artikel. Strategi analisis: mengumpulkan berbagai tulisan yang diperoleh dari koran, forum kegiatan ilmiah, dan/atau media internet terkait dampak pandemi terhadap kegiatan ekonomi dan aneka solusinya di Indonesia. Berbagai tulisan yang diperoleh dianalisis sebagai bangunan pemahaman penulis mengenai ruang lingkup permasalahan dan dampak ekonomi dari pandemi yang nantinya sebagai pijakan untuk merumuskan model solusi berbasis prespektif konsep kewirausahaan sosial (*Social Entrepreneurship*).

Berdasarkan penelusuran artikel mengenai dampak Pandemi Covid 19 yang sudah dilakukan melalui *google scholar*, *google*, dan *research gate* menemukan 8 artikel mengenai dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan

analisis artikel-artikel mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan sosial dilakukan pada lima hasil penelitian selain teori mengenai kewirausahaan sosial, yang digunakan untuk merumuskan model strategi penanganan dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Uraian-uraian hasil dan pembahasan pada artikel ini akan disajikan dalam tiga bagian, analisa penyebab turunnya produktivitas selama pandemi corona, dampak sosial ekonomi, dan alternatif solusi berbasis kewirausahaan sosial.

## Penyebab Turunnya Produktivitas Selama Pandemi Corona

Normalitas baru (*New Norms*) yang didengarkan serta diimplementasikan ke dalam aturan oleh beberapa pemerintah daerah dalam menjalani masa pandemi Covid-19, tidak semua pemerintah daerah memberlakukannya dalam bentuk aturan disertai *punishment*. Provinsi Yogyakarta termasuk wilayah yang menghindari normalitas baru berbasis aturan, lebih pada sosialisasi nilai-nilai baru selama pandemi. Dalam banyak kesempatan Gubernur DIY kerap kali mengatakan menghindari *lock down* atau pembatasan keluar rumah walaupun status

daerahnya adalah darurat. Logika yang dipakai jika berbasis aturan akan mengakibatkan tertutupnya banyak kran sumber pendapatan masyarakat, sama dengan pemikiran pemerintah pusat terlihat dikeluarkannya aturan presiden sekitar Bulan Juni Tahun 2020 mengenai pemutusan kebijakan *lock down* oleh daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau restu pemerintahan pusat, dan langkah maju mundur pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah kongkrit pemerintah dalam mengurangi jumlah penderita Covid-19 yang sudah diterapkan dan berkelanjutan, meliputi kebijakan *work from home* (WFH) terutama di lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkat dan pemberlakuan protokol Covid-19 di tempat-tempat keramaian atau aktivitas yang mengundang kerumunan massa.

Walaupun tidak menyentuh semua lini kehidupan, namun pembatasan ruang gerak masyarakat Indonesia tetap terjadi. Apabila berpijak prinsip dasar pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli maka adanya pembatasan gerak berpengaruh pada keberlangsungan aktivitas pasar yang didalamnya melibatkan banyak orang dengan peran ekonomi berbeda. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat kesejahteraan sosial. Pada krisis ekonomi pandemi corona, perhatiannya tidak hanya pada penanggulangan saja, namun penyebab krisis menjadi pusat perhatian sekaligus dan terjadi disemua negara sehingga permasalahannya kompleks. Penyebab krisis merupakan persebaran virus corona dengan sangat cepat tanpa diketahui obat ataupun vaksinnnya. Penyebab turunnya produktivitas masyarakat diakibatkan dua hal; sifat persebaran virus corona dan pengkondisian karakter lingkungan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir yang mengedepankan pelebaran batas antarnegara.

Dimulai sifat persebaran virus yang mengakibatkan kondisi mobilitas orang terbatas, hal ini terjadi dikarenakan persebaran virus corona melalui bersentuhan anggota badan, benda, dan nafas atau batuk. Terlepas dari aturan preventif yang diberlakukan longgar oleh pemerintah, menurut hasil survei

yang dilakukan Lembaga Kantar, hampir 80 persen masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama masa karantina atau permulaan darurat sekitar awal Bulan April-Juni Tahun 2020, kemudian jumlah prosentasenya turun menjadi kisaran 40% semenjak diberlakukannya *new normal*. Menariknya, *trend* ini tidak hanya terjadi di kota besar yang rata-rata termasuk zona merah, namun juga diikuti oleh kota-kota kecil yang kategori wilayahnya kuning atau hijau. Meskipun di kalangan masyarakat terutama kalangan bawah masih terjadi perdebatan perihal indikator-indikator dalam kategorisasi zona merah dengan kuning dan perlakuan penanganan baku pembeda oleh pemerintah pada setiap zona. Walaupun belum terjadi persamaan persepsi kategorisasi zona secara menyeluruh antar kalangan masyarakat, tetap membuat aktivitas usaha-usaha yang menuntut pergerakan manusia berkurang atau bahkan terhenti, seperti usaha transportasi, hotel, mall, *sport center*, industri pariwisata, infrastruktur, dan pasar modern ataupun tradisional.

Terbatasnya mobilitas gerak sudah mengganggu produktivitas usaha karena berkurangnya aktivitas transaksi pada berbagai bidang usaha, semakin bertambah akibat kecenderungan pola ekonomi global dalam menciptakan ketergantungan ekonomi antarnegara sebagai upaya integrasi ekonomi (globalisasi ekonomi) melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai Tahun 2015, tujuannya untuk menciptakan integrasi ekonomi antarnegara ASEAN dan diluarnya, sebelumnya sudah ada, yakni Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang memiliki tujuan integrasi ekonomi juga. Sehingga kalau dilihat dari kronologisnya, menggunakan prespektif integrasi ekonomi (globalisasi ekonomi) maka mewabahnya virus di Cina yang mengkondisikan adanya karantina total mengakibatkan terhentinya aktivitas berbagai usaha. Situasi tersebut sangat cepat berpengaruh terhadap negara-negara yang menjadi mitra dagang Cina termasuk Indonesia, terutama penyuplai bahan baku. Olah karena, dalam 10 Tahun terakhir Negara

Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Dengan demikian, memburuknya perdagangan di Cina akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satu contoh perusahaan eksportir kayu lapis dari Yogyakarta, semenjak Bulan Desember Tahun 2019 ini tidak produksi lagi karena terhentinya permintaan dari Negara Cina terkait status *lockdown* yang dijalkannya. Pada Bulan Agustus Tahun 2020 mulai beroperasi lagi, akan tetapi terjadi pengurangan volume pengiriman produk.

Kedua faktor penyebab di atas mendorong manusia berperilaku hidup sehat dan banyak melakukan aktivitas konsumsi berkaitan dengan diri, rumah (domestik), dan sekitarnya. Selain karena desakan situasi kondisi ekonomi dan kesehatan dorongan perubahan perilaku konsumsi merupakan representasi strategi coping (Kemampuan mengelola stress) yang banyak dilakukan orang pada masa menjalani pandemi corona ketika terkondisikan berada pada lingkungan sosial terbatas dengan penuh ketidakpastian dalam waktu lama. Sehingga perubahan perilaku hidup sehat dan konsumsi domestik,

menggeser dari menginginkan produk berdasarkan keinginan (*want*) untuk memenuhi aktualisasi diri merupakan ciri manusia modern (Schultz, 2011), ke produk yang sifatnya kebutuhan (*needs*) fisiologis dan rasa aman jiwa raga. Bahkan, kecenderungannya masyarakat mulai mendukung gerakan *degrowth*, yang memandang konsumsi penduduk dalam berbagai sektor sudah lebih besar dari yang bisa disediakan oleh bumi. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, kesalehan sosial masyarakat semakin meningkat terlihat dari banyaknya aktivitas perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya dengan mendaur ulang, memperbaiki, mendekorasi ulang, mendonasikan barang-barang atau makanan yang masih layak kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Adanya aneka musibah selalu diiringi dengan kebangkitan dan atau peningkatan solidaritas sosial, sudah merupakan sifat alamiah manusia.

Hasil uraian analisis pada bagian ini merupakan pengembangan dari kajian artikel-artikel, terlihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 1. Matrik Sintesis Mengenai Penyebab Turunnya Produktivitas Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19

No	Sumber dan Tahun	Penyebab Turunnya Produktivitas Selama Pandemi Covid 19
1.	(Suryahadi et al., 2020), (Yamali & Putri, 2020)	Sosialisasi mobilitas gerak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara langsung mempengaruhi keseharian masyarakat pada semua aspek, walaupun masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan.
2	(Hadiwardoyo, 2020), (Nasution et al., 2020), (Sitorus & Hidayat, 2020), (Yunus & Rezki, 2020),	Perubahan perilaku belanja masyarakat dan melakukan aktivitas mempengaruhi produktivitas menyeluruh

Sumber: Dokumentasi peneliti

### Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19

Kedua faktor penyebab di atas saling berkaitan, yang berdampak pada berkurangnya atau berhentinya aktivitas ekonomi beberapa usaha. Keadaan ini menciptakan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berkurangnya sirkulasi kegiatan produksi dan konsumsi dikalangan pelaku usaha dan

masyarakat. Buktinya dapat kita lihat pada awal Bulan April-Juli Tahun 2020 banyak hotel, mal, tempat wisata, dan aneka usaha lainnya yang tutup, di Provinsi Yogyakarta dampak tutupnya hotel mengakibatkan beberapa di antaranya dijual dikarenakan pemilik tidak bisa membayar tanggungan hutang usaha. Bahkan dapat dikatakan sepanjang kita hidup, situasi tutupnya aneka usaha dalam waktu tiga atau empat bulan

tingkat nasional atau global merupakan kejadian pertama kalinya. Kondisi ekonomi ini mendorong terciptanya krisis yang disebabkan berkurangnya pendapatan domestik negara (GDP), dampaknya pertumbuhan ekonomi akan turun dan kalau tidak bisa ditanggulangi akan meningkatkan inflasi (proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus). Dalam konteks sosial, krisis ekonomi tersebut akan mengakibatkan keresahan sosial dan potensi kerawanan sosial, munculnya permasalahan sosial bisa merupakan embrio terciptanya krisis politik.

Sementara Suryahadi, dkk (2020) dalam studinya memprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat pandemi Covid 19. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan (1) data Susenas bulan Maret dan September 2019; (2) melihat pola lonjakan peningkatan kemiskinan Tahun 2006 dan 2007 yang ada dikarenakan naiknya harga minyak dunia; dan (3) berdasarkan pertumbuhan ekonomi, jika penurunnya 1% mengakibatkan penambahan sekitar 1,4% persentase tingkat kemiskinan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data tenaga kerja untuk Bulan Mei Tahun 2020: 1,7 juta tenaga kerja formal dirumahkan, 749,4 ribu mengalami PHK, dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan (Sugiri, 2020). Melihat waktu rilis data tersebut, dipastikan jumlahnya semakin bertambah mengingat sampai dengan pertengahan Bulan Oktober Tahun 2020 pandemi Covid-19 belum usai. Oleh karena itu, lembaga serikat pekerja Indonesia pada banyak kesempatan yang ditayangkan di media televisi ataupun koran meminta pemerintah agar bisa mengambil langkah tegas mengenai nasib tenaga kerja Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja yang memunculkan pengangguran baru merupakan permasalahan sosial tersendiri, jika tidak segera dikelola dengan baik akan meningkatkan permasalahan lainnya. Dampak berkurangnya atau hilangnya pendapatan bisa memicu tindakan-tindakan penyimpangan sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan apabila terbatasnya solusi, menurunnya

pendapatan tentunya berpengaruh langsung pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan bukan hanya berkaitan dengan berkurangnya kemampuan pemanfaatan jaminan kesehatan saja, akan tetapi berpengaruh juga dalam mengkondisikan makanan sehat untuk diri sendiri dan keluarga. Sama dengan bidang pendidikan, dampaknya pada berkurangnya perhatian terhadap bidang pendidikan karena berkurangnya kemampuan finansial, terlihat dari menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru Tahun 2020 dan terjadi peningkatan mahasiswa yang mengambil cuti semester. Menurut lembaga Oxfam (OXFAM, 2020), situasi pandemi Covid 19 semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial di semua negara dunia, Negara Indonesia pada tingkat ASEAN peringkat ke-4 dengan peringkat global 93. Peringkat global turun jika dibandingkan Tahun 2018, saat itu peringkat Indonesia masih pada kisaran angka 90 dan masih masuk dalam kategori lebar ketimpangan sosial dan ekonominya.

Adanya ketimpangan (*inequality*) menunjukkan konsentrasi kue ekonomi kebanyakan dinikmati kelompok atas, berbagai studi menunjukkan ketimpangan merupakan katalis dari kecemburuan sosial masyarakat yang dapat memunculkan konflik sosial, dan kegaduhan politik. Bahkan bisa juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata mengubah persepsi masyarakat mengenai apa itu kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskinan bersifat relatif terhadap kepemilikan orang lain. Ketika sekelompok orang merasa mengalami ketidakadilan maka akan melakukan proses perbandingan (*reference group*) dengan kelompok yang lebih dari diri mereka. Perubahan persepsi kemiskinan, peningkatan ketimpangan, meningkatnya angka pengangguran bisa menjadi pemicu kegaduhan sosial di media sosial atau elektronik dan perilaku-perilaku intoleransi. Akhirnya, dapat mengurangi persatuan dan lambat laun mendorong terciptanya krisis di bidang politik tanah air Indonesia yang kita cintai.



Analisis di atas dihasilkan dari proses kajian hasil penelitian mengenai dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosial dan

ekonomi Indonesia, matrik sintesis dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. Matrik Sintesis Mengenai Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid-19 di Indonesia

No	Sumber dan Tahun	Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid 19 di Indonesia
1.	(Suryahadi et al., 2020)	Pandemi Covid-19 akan menciptakan kemiskinan baru di Indonesia sebanyak 8 juta
2.	(OXFAM, 2020)	Pandemi Covid-19 akan memperlebar ketimpangan sosial, termasuk di Indonesia
3.	(Yamali & Putri, 2020)	Sebagaimana akibat dari adanya penurunan pendapatan, krisis ekonomi akibat Covid-19 yang bersifat menyeluruh kalau tidak diantisipasi dapat meningkatkan perilaku penyimpangan sosial masif.
4.	(Hadiwardoyo, 2020), (Nasution et al., 2020), (Sitorus & Hidayat, 2020), (Yunus & Rezki, 2020)	Peningkatan kejenuhan akibat terlalu banyak berada di rumah merupakan embrio penyimpangan perilaku dan depresi, sehingga secara langsung mempengaruhi tingkat produktivitas.

Sumber: Dokumentasi peneliti

### Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 melalui Kewirausahaan Sosial

Perumusan model penanganan dampak Pandemi Covid-19 dalam artikel ini berpijak pada pentingnya saling memperhatikan antarsesama, seperti yang terlihat dalam tabel

intisari hasil penelitian mengenai pemberdayaan berbasis kewirausahaan sosial, yang merupakan konsep pemberdayaan berbasis kegiatan ekonomi. Secara ringkas hasil proses *literatur review* dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 3. Matrik Sintesis Mengenai Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Sosial

No	Sumber dan Tahun	Pemberdayaan Komunitas Berbasis Kewirausahaan sosial
1.	(Darmawi, 2019)	Kepedulian perusahaan yang tertuang dalam pelaksanaan program CSR dalam bentuk memberikan akses pendidikan dan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya merupakan langkah efektif dalam menyelesaikan masalah sosial, dan ini dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah
2.	(Torrido, 2016)	Terciptanya penguatan program kepedulian sosial lebih cepat terwujud melalui kebijakan pemerintah
3.	(Torrido, 2016), (Hakim & Wibisono, 2017)	Pemanfaatan modal sosial yang dikondisikan kedalam aturan di organisasi lokal bisa diarahkan untuk mewujudkan kesalehan sosial

Sumber: Dokumentasi peneliti

Sudah 5 Tahun terakhir pemerintah menjalankan kebijakan investasi ori dan sukuk, sebagai bentuk penanaman dana yang dijamin oleh pemerintah dengan bunga tinggi di bank-bank milik negara. Selama pandemi presentase bunga kedua bentuk investasi itu naik diiringi diturunkannya suku bunga untuk

tabungan dan deposito. Bentuk kedua kebijakan tersebut sangat menarik serta menguntungkan komunitas kelas menengah dan atas yang memiliki dana simpanan berlebih. Situasi pandemi berpengaruh pada dunia usaha secara menyeluruh yang membuat para pelaku usaha melakukan tindakan *wait*



*and see*, beralih bidang usaha, atau menanamkan modal usahanya kedalam surat berharga. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendapatkan dana (*fresh money*) pembangunan dengan meminjam uang ke masyarakat dan sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya menggunakan pendekatan surat berharga ori dan sukuk. Bentuk kebijakan ekonomi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak stabil, mengurangi uang negara. Sedikit memberikan pemahaman mengenai alasan pemerintah tidak memberlakukan *lockdown* dan selalu mempertimbangkan pendekatan ekonomi dalam mencegah meluasnya pandemi corona di Indonesia.

Kerentanan ekonomi nasional diselesaikan dengan pendekatan ekonomi menjadi tepat apalagi melihat fenomena yang terjadi pada dua krisis ekonomi sebelumnya. Peningkatan pengangguran baru diiringi bertambahnya pelaku usaha kecil menengah (UKM), disebabkan tipologi UKM tidak membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi sehingga mengakibatkan kemudahan untuk mengelutinya. Kebalikan dengan usaha besar yang membutuhkan modal dan teknologi tinggi sehingga tidak semua orang bisa mengikuti. Artinya, dipikiran kebanyakan masyarakat pengkondisian kegiatan kewirausahaan merupakan solusi mandiri. Fenomena ini sangat relevan terjadi lagi pada masa pandemi; melihat usaha bahan pangan, kuliner, *home decor*, *landscape*, agro bisnis, kesehatan, dan *fun* pada era pandemi mengalami peningkatan penghasilan dengan penggunaan internet yang semakin melebar. Seperti yang disampaikan Narsih (57 Th) pemilik usaha penjualan tanaman anggrek di Sleman yang sudah menggeluti usahanya selama empat tahun: ‘Sampai Bulan September Tahun 2020 penjualan tanaman anggrek mengalami peningkatan 250%, sedangkan penjualan pot sebagai sampingan mengalami peningkatan sebesar 400% dari biasanya sebelum pandemi’ (Wawancara dengan Narsih pemilik usaha agrobisnis di Yogyakarta, 2020). Sehingga di era pandemi terjadi penambahan pelaku-pelaku usaha pada bidang yang mengalami peningkatan

keuntungan, berasal dari pengangguran baru dan para pelaku usaha yang mengalihkan kegiatan ekonomi pada sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Oleh karena itu, bisa dirumuskan tiga fakta situasi dalam pandemi, yakni (1) kemungkinan terjadinya penambahan UKM pada bidang usaha tertentu; (2) dilema kondisi ekonomi dan kesehatan yang mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan program penanganan pandemi; dan 3) adanya peningkatan altruisme di kalangan masyarakat Indonesia, altruisme merupakan sifat memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan ini bisa dikembangkan karena Indonesia memiliki modal sosial dan solidaritas sosial tinggi, dalam indek memberi dunia kita berada rangking pertama di antara negara-negara lain. Terbukti dengan banyaknya aktivitas penggalangan dana untuk Covid-19 ini, dari pengadaan APD sampai ke pembagian sembako walaupun kegiatannya tidak berkelanjutan. Berpijak tiga fakta tersebut maka penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dengan memperhatikan tiga hal, yakni: pasar, negara, dan sifat altruisme masyarakat. Ketiga hal ini memiliki peran yang paling utama bagi kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi berbasis kegiatan ekonomi yang bisa mengkolaborasi ketiganya, dengan pengkondisian infrastruktur digital sebagai alat pencapaian tujuan, dan penerapan normalitas baru (*new-norms*) akan berkonsekuensi pada efisiensi dalam kegiatan ekonomi.

Pendekatan kegiatan kewirausahaan dipilih karena tujuan dari model strategi penanggulangan dampak adalah menghidupkan pasar (baca: kegiatan kewirausahaan) dan menyelesaikan masalah sosial. Dengan menghadirkan negara sebagai komunitas pemilik hak istimewa yang tidak dimiliki lainnya, yakni pembuat kebijakan serta memiliki kemampuan dalam menaikkan pajak, sehingga pendekatan negara digunakan agar percepatan terlaksananya tujuan kegiatan. Pendekatan konsep kewirausahaan sosial merupakan sebuah alternatif solusi penyelesaian masalah sosial

bersinergi dengan pasar (lihat Gambar 4). Implementasinya meliputi kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial; dan membuat program-program kegiatan ekonomi melalui institusi-institusi pemerintah dan BUMN daerah atau pusat berbasis kewirausahaan sosial; membuat kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan sekaligus memberdayakan komunitas sasaran agar bisa membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan sosialnya. Permasalahan sosial yang dimaksud dalam artikel ini yang mengalami peningkatan selama pandemi corona secara mendasar, yakni bertambahnya angka kemiskinan masyarakat Indonesia, dikarenakan berkurangnya atau terhentinya sumber pendapatan masyarakatnya. Sehingga model strategi ini ditujukan untuk mengikat misi sosial dengan kegiatan ekonomi agar berkelanjutan (*sustainable*).



**Gambar 4.** Model Strategi Penanggulangan Dampak Pandemi Berbasis Kewirausahaan Sosial  
Sumber: (Hasil Analisis, 2020)

Model strategi penanggulangan ini meliputi dua kebijakan berbasis kewirausahaan sosial: *Pertama*, kebijakan ekonomi berbasis kewirausahaan sosial. Seperti diketahui bersama, pemerintah beberapa kali mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk menangani dampak pandemi, seperti : (1) dana stimulus *charity* uang sebesar 200 ribu; (2) penanguhan angsuran KUR UMKM dan *driver ojek online*; (3) pemberian insentif pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (4) program pra-kerja (mendapatkan insentif per 4 bulan 600 ribu dan pelatihan); dan (5) pemberian dana usaha buat UKM sebesar 2,4 juta (BPUM). Syarat perolehannya bersifat

administratif, seharusnya penerima manfaat dari pelaku usaha kecil, menengah, atau besar yang memperoleh dukungan dana atau fasilitas besar dari pemerintah daerah/pusat bersama para UKM. Mereka yang bidang usahanya memperoleh penambahan profit pandemi Covid-19 dikenakan ketentuan memiliki misi menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi (CED) di lingkungannya. Besaran porsi keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial disesuaikan dengan level usaha.

Keterlibatan dalam penyelesaian masalah sosial tidak boleh bersifat *charity*, tapi pemberdayaan. Untuk usaha kecil dan menengah bisa menggunakan pendekatan model kewirausahaan sosial integratif dan bersinergian, pelaku usaha memperkerjakan tetangga atau saudaranya tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya pengalaman target atau klien. Memperkerjakan disini merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat *learning by doing*. Tentunya, peran klien disesuaikan kebisaannya untuk meminimalisir resiko kerugian usaha karena dalam pendekatan kewirausahaan sosial memiliki tujuan *profit oriented* juga. Sedangkan penerapan model kewirausahaan sosial bersinergian lebih khusus, pada situasi lingkungan usaha melemah maka ada dua cara adaptif yang bisa diterapkan, yakni (1) memilih target sasaran yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai *supplier* bahan baku atau penunjang yang terpuruk untuk kemudian diajak sebagai penyalur input produksi *social enterprise* (perusahaan yang menjalankan usahanya dengan pendekatan kewirausahaan sosial); dan (2) jika keberlangsungan usaha kuat bisa melakukan pengkondisian *supplier* baru pada komunitas sarannya. Berbeda dengan pelaku usaha besar, walaupun tidak memperoleh bantuan tunai langsung, namun mendapatkan fasilitas keringanan pajak, pengaturannya merujuk peraturan *cooperate social responsibility* (CSR) yang sudah ada, penerapannya bisa memilih menggunakan salah satu atau beberapa dari ketiga model kewirausahaan sosial yang ada, meskipun di era pandemi pelaku usaha besar memiliki kemampuan modal tinggi sehingga mudah

melakukan inovasi usaha yang disesuaikan tuntutan-tuntutan lingkungan ekonomi.

*Kedua*, pembuatan program ekonomi oleh institusi pemerintah dan BUMN. Institusi-institusi pemerintah daerah dan pusat adalah lembaga pelayanan masyarakat, dalam penyusunan anggarannya selalu terdapat porsi untuk misi sosial, pembuatan program ekonomi dalam model strategi mengkondisikan institusi pemerintah atau lembaga pemberdayaan memperoleh dan memiliki target pendapatan berupa keuntungan usaha (logika ekonomi), walaupun nantinya dapat diperuntukkan untuk reinvestasi sosial. Adanya *share profit* sangat penting sebagai target dan penumbuhkembangan motivasi kewirausahaan komunitas sasaran, selain untuk penambahan dana investasi sosial. Penerapan model kewirausahaan sosial pada program ekonomi yang dijalankan institusi pemerintah yang paling tepat adalah integratif. Teknik pendekatannya dengan memberikan komunitas sasaran wewenang untuk mengelola sepenuhnya jalannya usaha setelah dilakukan kegiatan pemberdayaan, di bawah pengawasan pemerintah sebagai pemilik usaha. Terpenting pengkondisian produk dan usaha pemberdayaan dihasilkan dengan pendekatan *bottom up*, dan berbasis lokalitas agar pelaksanaan dan capaian kegiatan lebih efisien dan efektif, dalam pelaksanaan proses jangan mengabaikan pengkondisian kerja sama antaranggota dalam komunitas. Besaran komunitas sasaran disesuaikan anggaran yang dimiliki institusi pemerintah karena antar institusi pastilah keberpemilikan kemampuan finansial berbeda.

Lembaga-lembaga BUMN lebih *flexible* dalam penerapan model kewirausahaan sosial, sebagai perusahaan negara tentunya kemampuan finansialnya lebih besar dari institusi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan sehingga bisa bebas dalam menentukan penerapan model kewirausahaan sosialnya sama dengan usaha besar. Lembaga-Lembaga BUMN dan usaha besar selama ini sudah banyak yang memiliki komunitas dampingan meskipun besaran dana yang digelontorkan masih dibawah ketentuan aturan CSR yang ada (Torrido, 2016). Terlepas dari itu, terpenting adalah penggunaan logika

ekonomi dalam menjalankan kegiatan pendampingan komunitas dampingan belum dilakukan, kebanyakan lembaga pemberdayaan lebih sekedar pembentukan kelompok kemudian memberikan dukungan dana, tenaga, dan waktu saja.

Kedepan, lembaga-lembaga BUMN, usaha besar, atau institusi-institusi pelayanan pemerintah, dalam menerapkan kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk dukungan penyelesaian masalah sosial. Pendekatan yang digunakan dengan kegiatan kewirausahaan, logika ekonomi, dan diimbangi penumbuhkembangan tradisi membeli produk lokal atau produk UKM Indonesia, baik dalam memenuhi maupun menunjang kebutuhan kantor dan pelayanannya. Dalam konteks ekonomi, penyelesaian masalah sosial berupa penguatan kapasitas dan pendayaan ekonomi, “membeli produk hasil pemberdayaan” merupakan salah satu bentuk pendayaan ekonomi komunitas sasaran pemberdayaan. Selama ini, kebanyakan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan lembaga pemerintah ataupun swasta hanya bersifat pembelaan (pelatihan dan pemberian modal), tidak diimbangi kepedulian terhadap keberlangsungannya. Terbukti, dengan masih rendahnya atau tidak adanya ritus membeli produk-produk UKM oleh pemerintah dan swasta.

Membeli produk pemberdayaan, merupakan bentuk kepedulian dan penjaga keberlangsungan usaha, jika tidak diupayakan akan memunculkan *distrust* masyarakat terhadap pemerintah atau pekerja sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan masih berlangsung di komunitas para pelaku usaha kecil menengah sentra kerajinan batik kayu di Dusun Krebet Sendangsari Kabupaten Bantul, salah satu kesimpulannya adalah kepercayaan pelaku usaha kerajinan batik kayu terhadap program-program pemerintah dan swasta kecenderungannya menurun. Hal itu, terlihat dari motivasi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta lebih mengutamakan pertimbangan perolehan materi (uang atau peralatan) secara langsung. Hasil penelitian ini

bisa dijadikan rambu 'hati-hati' bagi kegiatan pemberdayaan, agar bisa lebih memperhatikan keberlangsungan *trust* masyarakat dalam pelaksanaannya. Keberadaan *norm of trust* dapat mendorong terciptanya hubungan kerja sama mutualistik antarpemberdaya dengan masyarakat (Hakim & Wibisono, 2017).

Output usulan model yang berbasis kebijakan ini: (1) mengkondisikan para pelaku UKM sebagai target pemberdayaan, namun didorong untuk menjadi *social enterprise* bagi pelaku UKM lainnya dengan pendekatan kemitraan dan atau masyarakat sekitarnya disesuaikan kapasitas usahanya; (2) Menjadikan lembaga-lembaga pelayanan milik pemerintah nonusaha sebagai *social enterprise*; (3) Pendekatan investasi sosial berbasis CED dan tradisi beli produk UKM dalam memenuhi kebutuhan usaha dan atau kantor merupakan pendekatan yang digunakan lembaga-lembaga pelayanan pemerintah, BUMN, dan usaha besar dalam menjalankan fungsi sebagai *social enterprise*.

Pengawasan pelaksanaan model strategi penanggulangan ini di Indonesia dapat diterapkan. Selain pendamping yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, terdapat Lembaga Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) disetiap daerah didalamnya terdapat *coach* UKM dari kalangan praktisi yang sudah memiliki sertifikat, belum lagi Pekerja Sosial yang dimiliki Kemeterian Sosial dan PKH yang ada pada setiap kecamatan. Kesemuanya merupakan sumber daya yang bisa dikondisikan untuk menjadi pengawas, sebelumnya tentunya harus ada pemberdayaan pengawas untuk menyamakan persepsi dan penambahan pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi.

## Penutup

**Kesimpulan:** Penciptaan serta pengembangan pasar dan menyelesaikan permasalahan sosial dalam satu kegiatan pemberdayaan bisa didekatkan dengan pendekatan konsep kewirausahaan sosial. Keduanya saling berhubungan sehingga berkembangnya pasar yang berhasil diciptakan mengakibatkan berlanjutnya program

sosialnya (reinvestasi sosial). Oleh karena itu, penciptaan pasar tidak hanya sebatas pengkondisian sistem produksi usaha yang dijalankan komunitas sasaran. Namun, melebar sampai lembaga pemberdaya memposisikan dirinya sebagai *owner* atau pemilik usaha yang memiliki target keuntungan usaha kegiatan pemberdayaan.

Apabila hal tersebut dapat dijalankan, keuntungannya adalah (1) keberlanjutan penyelesaian masalah sosial bisa mengarah pada terciptanya kemandirian komunitas sasaran sinergi dengan penumbuhan ekonomi individu, keluarga, dan wilayah (*geographical economic*); (2) mengembangkan keberpemilikan motivasi kewirausahaan komunitas sasaran; (3) lembaga pemberdayaan (pemerintah dan swasta) memiliki penghasilan tambahan (*fundraising*), yang nantinya bisa diperuntukkan untuk pengembangan misi sosial tertentu atau pembangunan komunitas sasaran lainnya. Model strategi peanggulangan dampak sosial ekonomi pandemi corona mengkondisikan lembaga pemberdayaan, baik lembaga pemerintah atau swasta sebagai *social enterprise*.

**Rekomendasi:** Perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta diharapkan dalam melakukan kegiatan pengembangan komunitas menggunakan prespektif *socioentrepreneur* sehingga kegiatan pengembangan pada suatu komunitas sasaran dimaknai sebagai investasi sosial agar terdapat upaya lebih dalam menjaga keberlanjutannya karena diliputi pengharapan memperoleh *return* yang menguntungkan.

Pemerintahan Indonesia melalui kementerian yang ada agar bisa mengembangkan model strategi penanggulangan dampak sosial berbasis kewirausahaan sosial sebagai pola penanganan masalah sosial. Mendorong para UKM penerima bantuan dan lembaga dibawah kementerian agar dapat berperan sebagai *sociopreneur*.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada keluarga atas dukungannya, Prodi Ilmu Kesejahteraan UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesempatan mengabdikan sebagai pengajar sehingga penulis bisa tetap berupaya mengasah pengetahuan. Terakhir, terima kasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta atas kesempatan publikasi yang diberikan penulis sehingga dapat konsisten menyalurkan pemikiran penulis.

### Pustaka Acuan:

Alter, S. K. (2006). Social enterprise models and their mission and money relationships. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, 205–232.

Darmawi, A. (2019). *The Role of Government, Human Resources and Strategic Role of Training For Life Skill Empowerment*. 366(Icisp 2018), 1–4.

Hadiwardoyo, W.-45088-1-P. pd. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 [National Economic Losses Due to the Covid-19 Pandemic]. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>

Hakim, F. N., & Wibisono, G. (2017). Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(4), 369–380.

LaBarre, P. (2003). The new normal. *Fast Company*, 70, 74.

Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>

Nicholls, A., & Cho, A. H. (2006). Social entrepreneurship: The structuration of a field. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, 34(4), 99–118.

OXFAM. (2020). *The Commitment to Reducing Inequality Index 2020: Fighting Inequality in the time of COVID-19*. [www.inequalityindex.org](http://www.inequalityindex.org)

Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020). Berdaya di Era Pandemi: Peran Corporate Social Responsibility dalam Penanggulangan COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 37–48. <https://doi.org/10.22146/jsds.473>

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19.

*Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.

Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia | The SMERU Research Institute. *Poverty & Inequality Indonesia*, April. <https://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>

Torrido, A. (2016). Peran Lembaga Keuangan Penyedia Dana Mikro Dalam Menyediakan Kesempatan Kerja. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 131–143.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>